Menggabungkan strategi transisi yang adil ke dalam NDC dan respons Covid-19 negara-negara berkembang.

Membandingkan
wawasan dari Ghana,
Kolombia, dan Indonesia

CLIMATE Strategies
dala institute
FEDESARROLLO
Centro de Investigación Económica y Social
UNIVERSITY OF GHANA

Daftar Isi

Pendahuluan 7
Konteks 9
Pendekatan Studi Kasus 11
Metodologi Penelitian 11

Studi Kasus
Indonesia 12
Ghana 17
Kolombia 22

Investor, Donor dan MDBs 27
Kesimpula 29
Rekomendasi Pedoman 31
Pandangan / Langkah Selanjutnya 32
Daftar pustaka 32

Tanda penerbit

Penulis
Andrzej Błachowicz
Nia Hunjan
Lillian Lochner
Azka Azifa
Aidy Halimanjaya
Tari Lestari
Kuki Soejachmoen
Kwabena A. Anaman
Ruth M. Quaye
Paul Anartey
Eduardo Uribe-Botero

© Copyright 2021 Climate Strategies

Kutip laporan ini dengan Błachowicz, A et al. (2021): Incorporating just transition strategies into developing countries NDCs and Covid-19 responses. Comparing insights from Ghana, Colombia and Indonesia, Climate Strategies

Project management Nia Hunjan, Zoe Rasbash, Andrzej Błachowicz

Design Miesart - Michelle Haak

Translator Maria Intan Ravenska

Makalah ini disusun sebagai bagian dari proyek yang didanai oleh *European Climate Foundation*.

Pengantar

Kami mengucapkan terima kasih kepada individu dan institusi berikut atas komentar dan ulasan yang berharga pada berbagai versi makalah ini::

Peter J Glynn
Geeta Morar
Angela Nogueria Fey
Joyashree Roy
Maxensius Sambodo
Ying Zhang

Stockholm Environment Institute (Elisa Arond, Miquel Muñoz Cabré, Claudia Strambo)

Akronim

ADB	Asian Development Bank
AfDB	African Development Bank
AFOLU	Agriculture, Forestry, and Other Land Use
CIF	Climate Investment Funds
COP	Conference of the Parties
EBRD	European Bank for Reconstruction and Development
G20	Group of Twenty
GDP	Gross domestic product
GHG	Greenhouse Gas
IADB	Inter-American Development Bank
IFC	International Finance Corporation
ILO	International Labour Organization
IMF	International Monetary Fund
IPPU	Industrial Processes and Product Use
JT	Just Transition
MDB	Multilateral Development Bank
NDC	Nationally Determined Contribution
NPP	New Patriotic Party
PPP	Purchasing Power Parity
SME	Small and medium-sized enterprises
VAT	Value Added Tax
WB	World Bank

Ringkasan eksekutif

Kerangka transisi yang adil membahas tentang krisis ganda perubahan iklim dan kesenjangan. Prinsip-prinsip transisi yang adil harus memiliki jangkauan yang luas dan bersifat multidimensi, agar dapat mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi sambil menjaga agar tidak memperburuk kondisi yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan menempatkan pekerja dan masyarakat di pusat perdebatan tentang transisi, serta melibatkan pemangku kepentingan selama proses pengambilan keputusan. Di dalam konteks negara berkembang, di mana terdapat beragam struktur sosial-ekonomi dan politik, yang berdampingan dengan segudang kebudayaan, makna transisi yang adil harus fleksibel untuk mencerminkan berbagai perbedaan di dalam dan antar negara.

Tujuan proyek adalah untuk mengatasi kebutuhan mendesak untuk memperkenalkan strategi transisi yang adil dalam konteks negara berkembang dan kurang berkembang, menyelaraskan peningkatan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (*Nationally Determined Contributions* - NDC) dan strategi transisi yang adil dengan respons pemulihan Covid-19.

Laporan ini mengangkat temuan-temuan penelitian *Climate Strategies* yang tertuang dalam *Reflections Paper* tahun 2020: *Incorporating just transition strategies in developing country Nationally Determined Contributions*. Dengan memfokuskan keterlibatan di tingkat nasional, rekomendasi dalam laporan ini dirancang untuk membantu memandu pengembangan aspek kebijakan iklim nasional dari transisi yang adil. Penelitian ini mengadopsi pendekatan metode campuran yang melibatkan literatur yang relevan, dan studi kasus di tiga negara. Metodologi dalam negeri menggunakan kombinasi keterlibatan pemangku kepentingan langsung, antara lain dalam bentuk wawancara semi-terstruktur, dan sejumlah survei, yang disesuaikan dengan keadaan domestik masing-masing.

Temuan dari masing-masing studi kasus menunjukkan bahwa:

- Mitra penelitian dalam negeri memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang keadaan dan nuansa unik yang mengiringi pembuatan kebijakan di negara mereka.
- Kesadaran dan makna transisi yang adil di ketiga negara sangat bervariasi.
  - Kolombia adalah satu-satunya negara yang secara eksplisit memasukkan transisi yang adil ke dalam revisi NDC mereka, yang telah diajukan ke UNFCCC pada Desember 2020.
  - Di dalam pemerintah Indonesia, hanya ada satu biro di sebuah kementerian yang mengenal konsep transisi yang adil. Ini dikarenakan keterlibatan mereka dalam acara-acara internasional di mana prinsip-prinsip transisi yang adil telah dieksplorasi.
  - Di Ghana, kesadaran akan istilah 'transisi yang adil' sudah ada tetapi masih seperti keadaan di Indonesia di mana transisi yang adil belum dieksplorasi atau diadaptasi oleh pejabat pemerintah agar sesuai dengan konteks negara mereka.
- Metode pelibatan pemangku kepentingan disesuaikan dengan setiap konteks untuk melibatkan beragam aktor dalam konteks yang berbeda. Tahap proyek ini menemukan bahwa metode pelibatan yang lebih informal terbukti paling berhasil.
- Mitra dalam negeri masing-masing mengembangkan definisi mereka sendiri tentang transisi yang adil, untuk mencerminkan konteks daerah agar dapat secara efektif berkomunikasi dan menjelaskan manfaat dari penerapan strategi transisi yang adil di negara mereka.
- Untuk lebih menstimulasi diskusi dan saling berbagi pengetahuan dengan para pemangku kepentingan, mitra penelitian di Indonesia memulai setiap pertemuan dengan presentasi yang berhubungan dengan konteks transisi yang adil.
- Salah satu tantangan terbesar dalam menciptakan strategi transisi yang adil di negara berkembang adalah tingginya kegiatan ekonomi informal – yang bisa selalu berubah dalam konteks yang berbeda dan harus ditangani dengan cara yang sesuai dengan konteksnya.
- Penelitian ini juga memulai proses melibatkan donor, investor dan Multilateral Development Banks (MDBs) sebagai sumber keuangan dan pengetahuan untuk memfasilitasi penggunaan strategi transisi yang adil oleh pemerintah sebagai dasar pelaksanaan dialog inklusif antara pemangku kepentingan dengan masyarakat yang bersangkutan.
- Sehubungan dengan Covid-19, setiap negara telah terkena dampak dan respons langsung pemerintah

Ringkasan eksekutif

terkait adalah serupa yaitu dengan memberikan dukungan kepada yang paling rentan. Masing-masing telah menerapkan paket fiskal darurat untuk mengatasi dampak kesehatan, memberikan bantuan kepada rumah tangga dan perusahaan. Pandemi dan respons penanganannya telah menjadi penghalang dalam segala aspek, termasuk yang menyangkut keterlibatan pemangku kepentingan.
- Upaya respons Covid-19 belum dikaitkan dengan strategi adaptasi dan mitigasi iklim.

Laporan ini diakhiri dengan tiga temuan/ide utama yang disajikan dalam diagram Venn (Gambar 1). Pertama, temuan ini menyorot pentingnya membangun dan memelihara hubungan dengan pemangku kepentingan yang relevan untuk memungkinkan **kepemilikan transisi yang adil** dalam konteks nasional tertentu. Kedua, proyek ini telah menunjukkan pentingnya pengetahuan, keahlian dan kontak lokal melalui mitra dalam negeri untuk menempatkan masyarakat di pusat transisi yang adil. Dengan **berkolaborasi dan menyusun bersama** strategi iklim, mereka juga dapat mengatasi kesenjangan yang sudah dan berpotensi terjadi. Terakhir, studi ini menekankan perlunya memperluas cakupan transisi yang adil di luar negara-negara maju dan **mewujudkan cakupan global dari konsep transisi yang adil**. Studi ini memberikan beberapa petunjuk mengenai aktor mana yang tertarik untuk terlibat dalam diskusi seputar makna transisi yang adil dalam konteks lokal dan bagaimana upaya-upaya transisi yang adil dapat dilaksanakan. Tantangan seperti tenaga kerja informal dalam jumlah signifikan menjadi salah satu komponen penting untuk mentransformasi ekonomi dengan cara yang adil, yang perlu disadari dan diintegrasi ke dalam pendekatan transisi yang adil.

Studi ini mengidentifikasi beberapa pedoman dan rekomendasi kunci untuk pemerintah nasional. Pedoman dan rekomendasi tersebut dapat memberikan informasi tentang pendekatan untuk dukungan teknis dan peningkatan kapasitas serta keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk ekonomi informal (Gambar 2).



Gambar 1: Temuan kunci penelitian.

Seperti yang telah diketahui, tidak ada satu model yang cocok untuk semua, karena keadaan setiap negara adalah unik, dan makna transisi yang adil harus diadaptasi sedemikian rupa. Konsep transisi yang adil di negara maju, misalnya, tidak memasukkan sektor yang dominan di banyak negara berkembang menyangkut tenaga kerja, yaitu sektor informal. Hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan, di samping faktor-faktor lain seperti hambatan kelembagaan, tantangan keuangan dan hambatan seputar dialog sosial yang inklusif.

Tahap selanjutnya dari proyek ini akan bekerja sama dengan sembilan mitra dalam negeri, yang dipilih berdasarkan keadaan lingkungan, sosial dan ekonomi nasional mereka yang beragam. Keragaman ini akan memberikan rentang pengalaman yang lebih komprehensif yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat sipil di negara lain sebagai pedoman.

Ringkasan eksekutif



Gambar 2: Prinsip panduan bagi pemerintah nasional.

Pendahuluan

Transisi menuju dunia yang rendah karbon dan tahan iklim harus terwujud pada skala dan kecepatan yang belum pernah diupayakan sebelumnya. Meskipun banyak sektor karbon-tinggi seperti industri batu bara sudah mengalami transisi struktural, langkah tersebut harus dilakukan secara lintas sektoral dan ekonomi untuk mencapai target ambisius yang ditetapkan dalam kesepakatan iklim internasional.

Kerangka transisi yang adil membahas krisis ganda perubahan iklim dan kesenjangan. Prinsip-prinsip transisi yang adil harus memiliki jangkauan yang luas dan bersifat multidimensi, mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada sambil menjaga agar tidak memperburuk keadaan. Hal ini dilakukan dengan menempatkan pekerja dan masyarakat di pusat perdebatan transisi, yang melibatkan pemangku kepentingan selama proses pengambilan keputusan. Untuk mewujudkannya, penting untuk meningkatkan kapasitas dari berbagai komunitas untuk berpartisipasi di berbagai tingkat pemerintahan. Dalam transisi rendah karbon ini akan muncul sejumlah kompromi terkait peluang dan tantangan yang beragam di tingkat nasional, masyarakat, industri dan individu. Karena pemangku kepentingan yang berbeda akan memprioritaskan masalah yang berbeda, maka penting untuk mempertimbangkan beragam perspektif. Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi:

- perwakilan pemerintah yang terlibat dalam pengembangan kebijakan iklim dan komitmen internasional terkait, seperti Focal Point NDC, dengan Kementerian terkait lainnya,
- pemerintah daerah untuk membentuk diversifikasi ekonomi regional, memobilisasi sumber daya keuangan dan mendukung implementasi langkah-langkah transisi yang adil,
- serikat pekerja, karyawan formal dan informal dan pengusaha,
- perwakilan gender, pemuda, masyarakat adat, perwakilan masyarakat dengan kemampuan tertentu, dan masyarakat marginal,
- masyarakat yang terkena dampak transisi energi.

Dengan asal-usul gerakan buruh Amerika Utara tahun 1970-an, pendekatan transisi yang adil semakin mendapatkan popularitas di kalangan pekerja dan gerakan lingkungan. Pada COP24 di Polandia tahun 2018, kepresidenan Polandia menetapkan "Deklarasi Solidaritas dan Transisi Berkeadilan Silesia" yang memanggil banyak pihak untuk berkomitmen pada transisi yang adil. Kepresidenan tersebut menyatakan bahwa:

> **'Pelaksanaan transformasi berbasis solidaritas dapat membantu menghasilkan dan mempertahankan dukungan publik untuk kebijakan pengurangan emisi. Pada saatnya nanti hal ini dapat menjamin keberhasilan implementasi, yang merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan kebijakan iklim global.'** [1]

Sejak saat itu, diskusi seputar transisi yang adil kian mendapatkan daya tarik terutama di kalangan industri bahan bakar fosil, di mana transisi sedang berlangsung. Dalam wacana publik, terdapat dua narasi yang menonjol seputar transisi yang adil, yang pertama mengacu pada kebutuhan moral untuk tidak mengabaikan siapa pun. Yang kedua menangkap kebutuhan politik untuk mengurangi penolakan terhadap perubahan dari mereka yang berpotensi dirugikan selama masa transisi.[2]

Bagaimanapun, perdebatan dan kebijakan transisi yang adil masih masuk dalam konteks negara maju walau hanya sedikit dieksplorasi, atau pada penerapan praktis dalam konteks negara berkembang.[I] Negara-negara berkembang, meskipun beragam dan heterogen,

I. Pengecualian untuk hal ini antara lain Afrika Selatan dan India seringkali dalam konteks batu bara tetapi juga masalah transisi yang lebih luas. Misalnya, Afrika Selatan memiliki dukungan kelembagaan yang kuat untuk implementasi strategi transisi yang adil karena sudah masuk ke dalam kebijakan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Nasional dan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC). Transisi yang adil di India telah disorot, misalnya, melalui studi kasus yang dilakukan oleh *Climate Investment Fund* yang meneliti pelaksanaan di India dari perspektif pemahaman dan penerapan transisi energi yang adil di tingkat nasional dan lokal. Khususnya, strategi transisi yang adil tidak selalu disebut sebagai transisi yang adil, misalnya di Tiongkok, di mana banyak tindakan dan upaya yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menangani dampak ketenagakerjaan yang muncul selama restrukturisasi energi atau ekonomi, bertujuan untuk mencapai transisi yang adil sampai batas tertentu. Misalnya, untuk melakukan reformasi struktural di sisi penawaran yang dimulai sejak 2016, Tiongkok telah melakukan upaya khusus untuk membantu para pekerja yang terdampak untuk menemukan pekerjaan baru.

Pendahuluan

memiliki beberapa fitur unik yang saat ini belum dimasukkan ke dalam kerangka transisi yang adil. Karena tingkat pengangguran yang tinggi, dalam konteks ini kebijakan transisi yang adil harus fokus pada penciptaan lapangan kerja serta transformasi pekerjaan.

Selain itu, banyak masyarakat di negara berkembang yang tinggal di daerah atau pedesaan terpencil, di mana kurangnya akses energi masih menjadi masalah utama. Strategi transisi yang adil juga harus menangani masalah kemiskinan dan dapat digunakan untuk mendistribusikan kembali sumber daya meskipun dengan sistem kesejahteraan sosial yang belum memadai. Selain itu, negara-negara berkembang seringkali sangat menggantungkan ekonomi pada produksi atau ekspor sumber bahan bakar fosil dan diversifikasi ekonomi mereka sangat rendah. Ketika mempertimbangkan strategi transisi yang adil di negara-negara tersebut, perlu dicatat bahwa mereka setidaknya akan mengacu pada perubahan kebijakan di negara-negara maju. Tantangan lain dalam upaya penerapan prinsip transisi yang adil di negara-negara berkembang adalah begitu besarnya kegiatan ekonomi informal, yaitu setidaknya 60%[3] tenaga kerja bergelut di bidang tersebut. Meskipun perekonomian informal terlihat berbeda-beda di setiap konteks negara, yang seringkali terjadi adalah para pekerjanya tidak memiliki dokumen resmi sehingga tidak dapat bergantung pada negara untuk mendapatkan dukungan saat mereka membutuhkannya, atau di saat krisis. Untuk transisi yang adil, sangat penting untuk mengangkat topik pekerja informal ini ke dalam diskusi dan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan – setiap metodenya harus disesuaikan dengan masing-masing negara.

Tujuan dari proyek ini adalah untuk memberikan bukti dan wawasan dalam mendukung pengenalan strategi transisi yang adil di negara-negara berkembang, mempromosikan integrasi Kontribusi yang Ditentukan secara Nasional (NDC) yang lebih lancar ke dalam respons pemulihan Covid-19. Laporan ini mengeksplorasi dari studi-studi kasus di Kolombia, Ghana dan Indonesia, yang temuannya dapat memberikan wawasan yang berguna bagi negara-negara dengan karakteristik serupa. Dari penelitian tersebut muncullah beberapa rekomendasi pedoman yang dapat menjadi informasi bagi pemerintah nasional di negara berkembang, khususnya *focal point* NDC yang ingin memasukkan strategi transisi yang adil.

NDC adalah rencana aksi dan komitmen iklim yang dibuat sebagai bagian dari Perjanjian Paris. Namun, ketika perjanjian tersebut diadopsi pada tahun 2015, *Climate Action Tracker* memperkirakan bahwa kontribusi ini akan meleset dari target yaitu di bawah 2°C dengan ambisi mencapai 1,5°C dan pada kenyataannya pemanasan naik sampai sekitar 2.7°C.[4] Pada tahun 2020, yaitu pada peringatan lima tahun perjanjian ini, negara-negara diminta untuk memperbarui kontribusi mereka. Namun, karena pandemi Covid-19, proses ini tertunda. Dengan memasukkan strategi transisi yang adil ke dalam NDC mereka yang diperbarui, bersama dengan kebijakan iklim lainnya, negara-negara tersebut akan menjawab urgensi, skala dan sifat transformatif yang harus dicakup oleh rencana iklim.

Transisi yang adil juga dapat mengatasi masalah kesenjangan yang muncul akibat pandemi Covid-19 dan upaya *lockdown* terkait.[5] Bank Dunia memperkirakan bahwa pandemi ini dapat mendorong hingga 100 juta orang ke dalam kemiskinan ekstrem.[6] Meskipun sebagian besar negara berkembang telah merancang sejumlah paket fiskal sebagai tanggap darurat situasi tersebut, untuk mendukung sektor yang paling terkena dampak dan masyarakat yang paling rentan – akibat dan tantangan yang disebabkan oleh pandemi akan cukup parah dan berlangsung lama. Sementara banyak negara yang lebih kaya atau maju telah mengembangkan narasi pemulihan hijau, yang mencakup prioritas iklim jangka panjang dan jangka pendek untuk bangkit kembali dari pandemi,[7] banyak negara berkembang malah harus menyalurkan sumber daya langsung ke dalam krisis. Pandemi telah menyebabkan dan memperdalam kesenjangan yang ada. Keadaan ini dipadukan dengan harga yang fluktuatif dan ketidakpastian pasar untuk bahan bakar fosil juga semakin menegaskan kerentanan negara dan kawasan dalam menghadapi transisi energi. Hal ini dibahas pada Konferensi Perburuhan Internasional pada bulan Juni 2021 yang dihadiri oleh delegasi dari 181 negara yang mewakili pemerintah, pekerja, dan pengusaha, yang menyatakan "Panggilan Global guna Bertindak untuk Pemulihan yang Berpusat pada Manusia" dalam menyikapi pandemi. Berikut adalah kutipan dari Direktur Jenderal ILO, Guy Ryder:

> **"Kecuali kita secara khusus menangani kesenjangan yang semakin dalam selama krisis ini, ada risiko yang sangat nyata bahwa konsekuensi ekonomi dan sosial akan menyebabkan luka jangka panjang."[8]**

Negara-negara berkembang dapat memperoleh banyak manfaat dari merangkul gagasan transisi yang adil. Dengan mempertimbangkan keprihatinan terhadap kelompok tertentu, pemerintah dapat merancang kebijakan iklim yang tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga

Pendahuluan

mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang ada – yang meningkat karena pandemi dan upaya lockdown terkait.[9] Seperti yang akan ditunjukkan oleh studi kasus dalam laporan ini, kelompok-kelompok marginal seperti pekerja informal di Ghana tidak hanya prihatin dengan dampak perubahan iklim, tetapi mereka juga mengutarakan minat untuk berbagi pandangan mereka dan memasukkannya ke dalam strategi transisi yang adil. Dari sisi pemerintah, mereka berkesempatan untuk memegang kendali dalam mengadaptasi konsep transisi yang adil dengan kebutuhan rakyat dan ekonomi mereka masing-masing.

Berdasarkan temuan dan penelitian sebelumnya seperti tinjauan pustaka dari data-data yang ada, kelompok fokus, dan wawancara yang dilakukan oleh mitra negara di Ghana, Kolombia dan Indonesia, laporan ini pertama-tama memperkenalkan tentang konteks isu yang ada. Studi kasus ini fokus pada tantangan yang muncul dalam implementasi transisi yang adil, peran pekerja informal dalam transisi yang adil, dan sejauh mana pemerintah memperhitungkan transisi yang adil ke dalam kebijakan iklim mereka. Selain itu studi ini mengeksplorasi peran investor, donor dan *Multilateral Development Banks* (MDBs) dalam mempromosikan strategi transisi yang adil di negara-negara berkembang. Kami kemudian mengidentifikasi kesamaan antar negara sebelum menawarkan serangkaian pedoman tentang bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menanggapi beberapa tantangan umum tersebut.

Konteks

Kotak 1. Temuan dari Climate Strategies 2020 Reflection Paper: Menggabungkan strategi Transisi yang Adil ke dalam NDC (Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional) negara berkembang

Penelitian saat ini didasarkan pada temuan yang dilaporkan dalam Makalah Refleksi 2020, antara lain:

1. Baru sedikit konsensus seputar makna dan implikasi dari konsep transisi yang adil. Hal ini menciptakan hambatan dalam pemahaman, penerimaan, dan pengenalannya ke dalam kebijakan.
2. Pemahaman yang terbatas tentang bagaimana konsep transisi yang adil dapat diterapkan di negara-negara berkembang.
3. Keterlibatan dengan pemangku kepentingan dan pemerintah sangat penting untuk mewujudkan transisi yang adil dan saat ini masih terbatas.
4. Kapasitas dalam pemerintahan dan kelompok pemangku kepentingan harus ditingkatkan.
5. Perencanaan pasar tenaga kerja dalam menanggapi kebijakan iklim seringkali terletak pada portofolio lingkungan. Namun, departemen pemerintah seringnya beroperasi sendiri-sendiri dan tidak berkomunikasi secara memadai satu sama lain.
6. Pemerintah mencari panduan dan membutuhkan berbagai alat; dan
7. Tidak ada pendekatan satu ukuran yang cocok untuk semua. Model untuk memperkenalkan prinsip-prinsip transisi yang adil harus responsif terhadap keadaan domestik masing-masing.

Untuk mencapai target-target yang telah diabadikan dalam Perjanjian Paris sekaligus mempertahankan dukungan sosial dan politik, transisi global harus dilakukan dengan cepat dan adil. Dalam Makalah Refleksi[10] yang disusun oleh *Climate Strategies* setelah COP25 pada tahun 2019, kami mengidentifikasi adanya hambatan dan jalur yang memungkinkan untuk memandu implementasi strategi transisi yang adil di negara berkembang (seperti yang ditunjukkan pada Kotak 1).

Makalah Refleksi melaporkan kurangnya informasi praktis tentang bagaimana prinsip-prinsip transisi yang adil dapat diterapkan di negara-negara berkembang, di mana literatur yang ada terlalu fokus pada negara-negara maju. Kita perlu mengupayakan agar pengembangan dan konseptualisasi tentang transisi yang adil harus mempertimbangkan konteks negara berkembang yang heterogen dan beragam. Salah satunya termasuk rekomendasi praktis tentang integrasi transisi yang adil ke dalam NDC dan respons Covid-19, dan penyediaan sumber daya kepada pemerintah, donor, investor, dan MDB. Sumber daya untuk pemerintah mencakup pendanaan, bantuan teknis, dan pedoman untuk penerapan transisi yang adil oleh pemangku kepentingan yang terlibat. Sumber daya untuk donor dapat mencakup pedoman, sedangkan sumber daya untuk investor mungkin terdiri dari data tentang bagaimana transisi yang adil mempengaruhi investasi, atau tentang kondisi peraturan yang berubah-ubah yang dapat membentuk pasar investasi.

Tahap proyek ini bertujuan untuk mempertemukan para peneliti, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun hubungan yang penting bagi perencanaan transisi terpadu jangka panjang. Melalui proses pelibatan yang dirancang secara nasional, tujuan kami adalah untuk menciptakan "komunitas praktik" nasional yang akan terus berkontribusi pada pekerjaan lanjutan di tahun 2021-2023. Fokus utama di tahun-tahun mendatang adalah mengembangkan strategi untuk mendukung inklusi pekerja informal, karena saat ini mereka masih absen dari dialog-dialog transisi yang adil, dan tidak tercakup dalam berbagai tingkatan dalam paket respons Covid-19.

Tahap selanjutnya dari proyek ini akan mencakup studi kasus di total sembilan negara. Kami akan terus bekerja dengan para mitra di Ghana, Kolombia dan Indonesia di negara mereka masing-masing dan juga memperkenalkan enam negara baru yang dipilih karena keadaan lingkungan, sosial dan ekonomi mereka yang beragam. Keragaman ini akan memberikan rentang pengalaman yang lebih komprehensif yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat sipil di negara lain sebagai pedoman.

Pendekatan studi kasus

Stretegi transisi yang adil mencakup transformasi yang akan melibatkan beragam aktor. Strategi-strategi ini juga sangat terlokalisasi dan bergantung pada konteks dan oleh karena itu keterlibatan pemangku kepentingan harus dilakukan pada tingkat di mana strategi sedang dikembangkan. Dengan memfokuskan keterlibatan kami di tingkat nasional, rekomendasi dalam laporan ini dirancang untuk membantu memandu pengembangan aspek kebijakan iklim nasional dari transisi yang adil. Dengan cara ini, tujuan kami adalah agar negara-negara dapat mengatur pendekatan transisi yang adil sehingga sesuai dengan kebutuhan nasional mereka sendiri dan memasukkannya ke dalam NDC mereka.

Salah satu keterbatasan dari studi ini adalah fokus pada tingkat nasional. Pada tahap proyek berikutnya kami akan menaruh fokus pada tingkat daerah, karena otoritas daerah dan aktor lokal memainkan peran penting dalam transisi yang adil.

Tiga negara dipilih karena keadaan geografis, lingkungan, tata kelola, budaya, dan sosial ekonomi mereka yang beragam. Indonesia, Ghana, dan Kolombia masing-masing memiliki banyak ciri berbeda yang belum dibahas dalam pendekatan-pendekatan transisi yang adil hingga kini seperti tingginya jumlah pekerja informal, kawasan yang miskin energi dan aktor budaya seperti masyarakat adat dan pemimpin tradisional. Meskipun kami menemukan bahwa strategi transisi yang adil perlu disesuaikan dengan keadaan unik masing-masing negara, temuan-temuan dari studi kasus ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi negara-negara dengan karakteristik serupa.

Kolaborasi dengan mitra dalam negeri[II] sangat penting untuk memastikan kesesuaian proyek dengan pengetahuan dan pemahaman intelektual domestik, dan dengan aktor yang menaruh minat. Di setiap negara, kami bermitra dengan peneliti kebijakan iklim yang memiliki pengalaman signifikan dalam berurusan dengan proses kebijakan perubahan iklim di negara mereka.

Metodologi penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan metode campuran yang melibatkan tinjauan literatur yang relevan, dan studi kasus di tiga negara. Metodologi-metodologi dalam negeri menggunakan kombinasi pelibatan pemangku kepentingan langsung, yang mencakup wawancara semi terstruktur, dan survei, yang disesuaikan dengan keadaan domestik masing-masing.

Setiap studi kasus memberikan rincian tentang metode spesifik untuk melibatkan para pemangku kepentingan. Pada tahap proyek ini, mereka berfokus pada prioritas pembangunan nasional dan pemangku kepentingannya, dan pada tahap berikutnya akan diperluas untuk memberikan pendekatan lintas sektoral yang lebih holistik.

II. Mitra dalam negeri untuk penelitian ini adalah: Dala Institute for Environment and Society di Indonesia, the University of Ghana, and Fedesarrollo di Kolombia.

Indonesia

Studi Kasus



Studi Kasus Indonesia

Studi kasus berikut ini merangkum dan menganalisis penelitian yang dilakukan oleh mitra-mitra dalam negeri.

$12.334
PDB per kapita (paritas daya beli, PPP):

terbesar ke-7 di dunia
(PDB PPP), dan terbesar di Asia Tenggara

270 juta
populasi

38,2
Koefisien Gini

Republik Presidensial
Struktur politik

10,19%
populasi di bawah garis kemiskinan

Industri Utama
minyak bumi dan gas alam, tekstil, otomotif, peralatan listrik, pakaian jadi, alas kaki, pertambangan, semen, peralatan dan perlengkapan medis, kerajinan tangan, pupuk kimia, kayu lapis, karet, makanan olahan, perhiasan, dan pariwisata

Faktor ekonomi yang membedakan
Deforestasi skala besar; eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan; pergeseran ke pengembangan kemampuan industri

57%
pekerja informal

Sumber: World Bank 2020; BBC Country Profiles 2020, CIA World Fact Book 2020

Ikhtisar

Sebelum pandemi Covid-19, Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, setelah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan hingga lebih dari setengahnya sejak tahun 1999.[11] Indonesia adalah salah satu negara terpadat di dunia, dan tengah menghadapi beberapa tantangan seputar kesenjangan sosial dan ekonomi. Manfaat yang dihasilkan dari pertumbuhan selama beberapa dekade belakangan ini tidak terbagi secara merata, sehingga banyak masyarakatnya yang terabaikan, terutama di pedesaan.

Oxfam melaporkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang berada di batas garis kemiskinan, dengan 1% populasi terkaya menguasai 49% dari kekayaan negara.[12] Selain itu, Susenas melaporkan bahwa hanya sekitar 10% masyarakat Indonesia yang menghabiskan lebih dari $10 per hari pada tahun 2021.[13] Dengan penerapan strategi transisi yang adil dapat memberikan Indonesia beberapa manfaat tambahan termasuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Studi Kasus Indonesia

Untuk memerangi perubahan iklim, melanjutkan pertumbuhan ekonomi dan mengangkat masyarakatnya keluar dari kemiskinan, Indonesia harus memastikan transisi yang adil untuk melakukan transformasi menuju ekonomi yang netral karbon pada tahun 2060.[14] Transisi ini bersifat kompleks dan berpotensi besar untuk meminimalkan kesenjangan di negara ini. Dengan menggunakan lensa transisi yang adil, Indonesia dapat mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, di sektor energi, Indonesia terus mensubsidi bahan bakar fosil yang tidak hanya memperlambat dekarbonisasi tetapi juga memperlebar jarak kesenjangan (karena keuntungan sebagian besar diberikan kepada orang kaya). Transisi yang adil dalam hal ini diperlukan untuk membawa beragam pemangku kepentingan ke meja perundingan dan untuk mencapai persetujuan sosial dan politik. Penelitian ini menemukan bahwa banyak aktor non-pemerintah seperti serikat pekerja dan lembaga *think tank* sudah mengenal konsep transisi yang adil, karena mereka telah terlibat secara aktif dengan beberapa inisiatif terkait transisi yang adil, baik di tingkat nasional maupun lokal. Di dalam pemerintahan ditemukan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan tertentu sudah mengenal konsep transisi yang adil. Pertama, Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan telah terlibat dalam diskusi internasional tentang transisi yang adil, termasuk acara sampingan CO25 di Madrid yang diselenggarakan oleh ILO. Kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu focal point NDC Indonesia, juga terlibat di tingkat internasional, pada COP24 Katowice di tahun 2018. Di sini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung Deklarasi Silesia baik melalui pernyataan tertulis maupun berupa kehadiran di acara tersebut.

Meskipun Kementerian ini sudah akrab dengan konsep transisi yang adil, konsep tersebut belum dieksplorasi atau diterapkan pada konteks negara secara nasional. Selain itu, istilah 'transisi yang adil' itu sendiri mungkin terdengar asing dan tidak jelas, seperti ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Dala Institute di mana mereka menemukan bahwa istilah tersebut pernah disalahartikan sebagai 'hanya' transisi.

Oleh karena itu, langkah pertama pelibatan pemangku kepentingan dilangsungkan secara informal, dengan diskusi terbuka dan berbagi pengetahuan. Dengan memanfaatkan kontak pribadi dan pengetahuan lokal, kegiatan peningkatan kapasitas dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan webinar. Pemangku kepentingan yang dikonsultasikan untuk tahap awal penelitian tersebut meliputi:

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
- Kementerian Koperasi dan UKM,
- Kementerian Pariwisata,
- Kementerian Ketenagakerjaan,
- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan
- Institute for Essential Services Reform.

Untuk meningkatkan pemahaman tentang transisi yang adil dalam konteks domestik, menstimulasi diskusi dan meningkatkan kepercayaan diri dari pejabat pemerintah yang memimpin subjek ini, sebuah presentasi disampaikan oleh para peneliti kepada para pemangku kepentingan sebelum setiap pertemuan. Termasuk di dalamnya adalah tentang latar belakang dan sejarah transisi yang adil, pentingnya transisi yang adil dalam konteks domestik, dan studi-studi kasus tentang implementasi transisi yang adil di seluruh dunia. Untuk mengkomunikasikan maknanya, berikut ini adalah definisi yang diadopsi:

"Dalam konteks Indonesia, transisi yang adil merupakan cara untuk mengelola perubahan aspek manusia dalam merespons perubahan iklim, baik dalam mengurangi emisi maupun beradaptasi dengan dampaknya, sebagai bagian integral dari transisi untuk mencapai prioritas pembangunan nasional dan pembangunan yang rendah karbon."

Kotak 2. NDC dan komitmen Transisi yang Adil

Indonesia telah menandatangani Deklarasi Silesia[15] dan pada tahun 2019 Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Deklarasi Bogor sebagai komitmen tripartit untuk menanggapi perubahan iklim dan menjamin transisi yang adil.[16] Tiga pihak yang terlibat antara lain pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja. Sebagai bagian dari proses ini, serikat pekerja diajak berkonsultasi untuk menyusun Strategi Jangka Panjang 2050 tentang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim yang secara eksplisit telah memasukkan transisi yang adil. Meskipun pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa tujuan rendah karbon dalam Rencana Pembangunan Nasional Pemerintah mereka, perlu dicatat bahwa jalur untuk mencapai target-target tersebut belum dijabarkan atau dijelaskan secara konkrit. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan dan komitmen yang lebih kuat di bidang ini, baik oleh otoritas nasional maupun daerah.

Selain itu, pemerintah Indonesia terus mensubsidi bahan bakar fosil, yang tidak hanya memperlambat transisi ke ekonomi rendah karbon, tetapi juga memperlebar jarak kesenjangan karena subsidi terutama dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Dikarenakan Covid-19 dan untuk mempertahankan dukungan politik, tidak mungkin pemerintah akan mengurangi subsidi ini.

NDC yang ada saat ini dan rancangan NDC yang diperbarui tidak secara eksplisit menyebutkan transisi yang adil. Ada kemungkinan bahwa NDC yang diperbarui akan secara eksplisit membahas transisi yang adil, tetapi baru dapat dikonfirmasi setelah dokumen diterbitkan. Strategi transisi yang adil harus bersifat lintas sektoral dan karena program perubahan iklim di sektor pertanian, kehutanan dan pemanfaatan lahan lain (AFOLU), energi dan transportasi, serta limbah dan proses industri dan penggunaan produk (IPPU) masih sedang dikembangkan, strategi transisi yang adil harus turut dipertimbangkan. Hal ini sejalan dengan prioritas perubahan iklim pemerintah dan akan dimasukkan ke dalam NDC Indonesia yang akan datang. Tantangan yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah perlunya untuk mengkoordinasikan berbagai departemen pemerintah yang terlibat dalam masalah kebijakan iklim dan ketenagakerjaan. Kementerian seringkali tampak bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi lintas kementerian yang efektif.

Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya

Untuk mengarusutamakan dan mengembangkan transisi yang adil di Indonesia, harus ada pertukaran pengetahuan dan koordinasi lintas kementerian yang berkelanjutan tentang isu ini. Misalnya, penting bahwa sektor-sektor seperti pariwisata, yang sebagian besar terkena dampak perubahan iklim dan mempekerjakan jutaan masyarakat Indonesia, dimasukkan ke dalam diskusi dan kebijakan mengenai transisi yang adil. Selain itu, sangat penting untuk memasukkan kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro. Untuk mempercepat pengarusutamaan ini, kelompok kerja seputar transisi yang adil untuk aksi iklim harus mulai melibatkan berbagai kementerian dan aktor non-pemerintah lainnya yang kurang memahami masalah ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Focal Point NDC perlu memperkuat kepemilikannya atas inisiatif transisi yang adil dan memainkan peran yang lebih aktif dalam memimpin perumusan agenda transisi yang adil serta pelaksanaannya. Selain itu, kepemimpinan dalam transisi yang adil tidak hanya harus di tingkat pemerintahan, tetapi juga di tingkat daerah dan desa jika ingin berhasil. Dalam praktiknya, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyatakan bahwa mereka menyambut baik dukungan dari para aktor eksternal, seperti Dala Institute, untuk mendukung mereka dalam mempersiapkan dokumen perencanaan tentang dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan dan dalam mempromosikan isu transisi yang adil sebagai bagian dari pertemuan G20, di mana Indonesia yang akan menjadi tuan rumahnya pada tahun 2022.

"Saya sangat mengapresiasi Dala yang sudah memulai diskusi ini. Dari semua isu yang diangkat pada Perjanjian Paris, hanya isu ini yang belum dibahas," Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia.

Studi Kasus Indonesia

Kotak 3. Covid-19

Krisis global yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 telah membawa kesulitan bagi Indonesia. Antara Maret dan September 2020, statistik resmi melaporkan kenaikan angka masyarakat yang hidup dalam kemiskinan sebanyak satu juta orang dari 26,42 juta menjadi 27,55 juta.[17] Sebagai respons Covid-19, pemerintah Indonesia menerapkan paket fiskal darurat, yang mengucurkan total $40.188.141.240[III] (sekitar 3,8% dari PDB) sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).[18]

Kementerian Ketenagakerjaan saat ini fokus pada sektor-sektor yang paling terpukul oleh Covid-19, seperti sektor pariwisata yang menyumbang 10,5% dari tenaga kerja nasional,[19] di mana 50% di antaranya adalah pekerja informal. Beberapa kementerian telah mengalihkan anggaran mereka untuk peningkatan kapasitas dan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, namun kegiatan tersebut tidak terkait dengan aksi iklim atau transisi yang adil. Meski dalam banyak kasus dampak Covid-19 telah memberikan momentum untuk mempercepat transisi rendah karbon, namun di Indonesia justru membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam mendorong transisi ini. Oleh karena itu, saat ini respons pemerintah Indonesia terhadap Covid-19 tidak terkait dengan strategi pengelolaan dampak perubahan iklim dan komitmen NDC-nya.

Kotak 4. Ekonomi Informal

Perekonomian informal membentuk 57% dari profil mata pencaharian, di mana pekerjaan utama dibagi menjadi pekerja pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan sebagian besarnya berbasis pada bidang pertanian, dan di perkotaan seringkali digaji tanpa kontrak formal (buruh harian, konstruksi; pekerja bulanan, asisten rumah tangga); atau dipekerjakan melalui akun mandiri mereka (teknologi berbasis platform; berbasis lokasi, transportasi, pengiriman, rumah tangga). Meskipun ekonomi informal merupakan sektor dengan jumlah tenaga kerja yang signifikan, tidak ada lembaga khusus yang menangani atau mewakili mereka. Hal ini masih menjadi isu lintas sektoral dan lintas kementerian, maka koordinasi antar lembaga pemerintah sangatlah wajib dalam upaya inklusi ekonomi informal ke dalam transisi yang adil dan kebijakan iklim.

III. 579.800.000.000.000 Rupiah Indonesia. Kurs pada 25 Juni 2021: 1 Rupiah Indonesia setara dengan 0,000069 Dollar Amerika

Ghana

Studi Kasus



Studi Kasus Ghana

Studi kasus berikut ini merangkum dan menganalisis penelitian yang dilakukan oleh mitra-mitra dalam negeri.

$5.652
PDB per kapita PPP

terbesar kedua di Afrika Barat
dan terbesar kedelapan di Afrika

30,4 juta
populasi

43,5
Koefisien Gini

Republik Presidensial
Struktur Politik

23,4%
Populasi di bawah garis kemiskinan

Industri besar
pertambangan, perkayuan, manufaktur ringan, peleburan aluminium, pengolahan makanan, semen, pembuatan kapal komersial kecil, minyak bumi dan produk minyak bumi

Faktor ekonomi yang membedakan
Pertanian mempekerjakan 42% tenaga kerja dan menyumbang 20% terhadap PDB; Ghana adalah pengekspor produk pertanian; pengekspor kakao terbesar kedua di dunia; pengekspor mineral dan telah menjadi pengekspor minyak mentah sejak Desember 2010

86,2%
Sektor Informal (bekas Pertanian)

42%
bekerja di sektor pertanian

Sumber: World Bank 2020; BBC Country Profiles 2020, CIA World Fact Book 2020

Ikhtisar

Selama 28 tahun terakhir, Ghana telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, ditambah dengan langkah menuju demokrasi di bawah sistem multi-partai serta pengurangan tingkat kemiskinan yang signifikan.[20] Ghana sekarang memiliki ekonomi terbesar kedua di Afrika Barat dengan pertumbuhan terbesar di sektor jasa dan industri.[21] Namun, Oxfam melaporkan bahwa kebijakan fiskal dan sosial-ekonomi yang telah memicu pertumbuhan ini sebenarnya makin memperburuk kesenjangan yang sudah ada sebelumnya, di mana yang terkaya menguasai sebagian besar dari manfaat pertumbuhan dan kekayaan negara.[22] Degradasi lingkungan juga semakin memburuk, dengan kegiatan penambangan ilegal (dikenal di Ghana sebagai galamsey) mencemari negara-negara yang dulunya merupakan sungai yang sangat jernih.

Studi Kasus Ghana

Transisi yang adil penting dalam konteks Ghana karena dapat menjamin transformasi inklusif menuju ekonomi nol-karbon, mengatasi krisis iklim dan kesenjangan. Mengenai istilah ini – transisi yang adil – ternyata pejabat pemerintah terkait sudah mengenal istilah tersebut tetapi tidak mensosialisasikan maknanya. Meskipun banyak pemangku kepentingan non-pemerintah yang belum akrab dengan istilah 'transisi yang adil', mereka menyatakan pentingnya kebijakan iklim diimplementasikan secara *adil*.

Proses pelibatan pemangku kepentingan butuh pengulangan dan melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan. Sedari awal sudah terlihat bahwa pelibatan pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah dalam suasana formal tidak efektif. Oleh karena itu, pendekatan berbeda untuk menarik keterlibatan dilakukan dengan lebih informal bagi kelompok pemangku kepentingan yang berbeda.

Anggota sektor informal dipilih secara acak dan dilibatkan menggunakan kombinasi survei dan wawancara tatap muka. Wawancara dilakukan secara pribadi di rumah atau di lokasi pekerja berdasarkan identifikasi menggunakan nomor ponsel mereka. Totalnya, tim peneliti mengumpulkan data dari 40 pekerja di dua distrik pinggiran kota di Accra. Bersama dengan dewan adat, dilakukan dua putaran kunjungan dengan empat kepala tertinggi (dua matrilineal dan dua patrilineal). Dalam populasinya, Ghana dibagi menjadi dua sistem budaya matrilineal dan patrilineal yang hampir sama rata. Selain itu, wawancara pribadi dilakukan dengan dua belas pemimpin organisasi di sektor formal. Meski sudah berulang kali mengunjungi pejabat pemerintah, banyak dari mereka yang tidak bersedia memberikan informasi karena penelitian ini tidak secara langsung berasal dari pemerintah melainkan dari lembaga akademis. Proses tersebut cukup padat karya dan sumber daya yang melibatkan 30 kunjungan selama dua bulan.

Untuk berkomunikasi dan berbagi pengetahuan, Universitas Ghana mengadopsi definisi transisi yang adil di bawah ini, agar dapat dipahami oleh semua kalangan terlepas dari latar belakang akademis atau keterlibatan mereka dalam masalah perubahan iklim:

"Strategi transisi perubahan iklim yang adil adalah inisiatif kebijakan dan respons adaptasi masyarakat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya yang diimplementasi oleh pemerintah dan masyarakat, secara umum, yang dapat menjamin perlindungan hak-hak pekerja, kelestarian lingkungan, dan partisipasi inklusif dari seluruh warga negara menuju tercapainya pembangunan berkelanjutan melalui langkah dan aksi bertahap."

Kotak 5. NDC dan Komitmen Transisi yang Adil

Tidak ada penyebutan eksplisit tentang strategi transisi yang adil dalam NDC Ghana saat ini. Departemen utama pemerintah yang menangani kebijakan perubahan iklim adalah pertanian, energi, kehutanan, limbah, dan kesehatan. Dalam NDC[23]-nya kepada UNFCCC, pemerintah Ghana mengusulkan 20 program mitigasi dan 11 adaptasi untuk dilaksanakan antara tahun 2020-2030.

Penelitian untuk laporan ini menunjukkan keterbatasan pengetahuan dan keterlibatan pemangku kepentingan menyangkut strategi transisi yang adil. Di antara kelompok buruh yang diajak berkonsultasi, hanya Kongres Serikat Pekerja Ghana yang melakukan sejumlah upaya untuk mengembangkan strategi ini. Terkait konsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan, Badan Perlindungan Lingkungan melibatkan beberapa pihak tertentu dari sektor informal, namun keterlibatan mereka sejauh ini masih kurang.

Studi Kasus Ghana

Kotak 6. Covid-19

Pada tahun 2020, pemerintah menghabiskan sekitar 2,1% dari PDB sebagai respons Covid-19, di mana 0,3% di antaranya untuk layanan kesehatan. Ditemukan bahwa 65% pekerja informal yang disurvei selama proses keterlibatan pernah mendengar paket stimulus yang diberikan oleh pemerintah sebagai respons Covid-19. Namun, hanya 1,25% responden yang menyatakan telah menerima bantuan dari program stimulus pemerintah, meskipun 88% pekerja informal yang disurvei melaporkan penurunan penjualan yang drastis karena pemberlakuan lockdown. Sebaliknya, perwakilan lembaga formal yang ikut serta dalam konsultasi penelitian ini tidak melaporkan adanya dampak ekonomi secara langsung karena semuanya tetap bekerja.

Alasan para pekerja informal tidak menerima bantuan menurut mereka adalah karena adanya bias dalam distribusi bantuan pemerintah kepada pendukung dan anggota partai yang berkuasa, di mana New Patriotic Party (NPP) yang menerima bantuan paling banyak, tampaknya berhubungan dengan pemilihan umum 2020. Faktor lainnya termasuk tidak adanya nomor pokok wajib pajak, dan masalah transportasi/logistik yang mempengaruhi pergerakan pegawai pemerintah dan penyedia layanan. Bantuan yang dibutuhkan oleh pekerja sektor informal terutama dalam bentuk bantuan finansial seperti hibah dan pinjaman (dinyatakan oleh 93% responden) dan pelatihan usaha (dinyatakan oleh 73%).

Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya

Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengetahuan seluruh pemangku kepentingan yang disurvei cukup tinggi tentang perubahan iklim dan dampaknya. Namun, studi tersebut menemukan ketidakseimbangan pengetahuan di antara para pemangku kepentingan dalam hal kebijakan iklim dan strategi transisi yang adil. Pekerja sektor informal menunjukkan bahwa mereka hampir tidak pernah mendengar tentang strategi transisi yang adil sehingga mereka hanya memainkan peran kecil dalam mengembangkan kebijakan iklim.

Tingginya pangsa ekonomi informal membuat perencanaan tenaga kerja semakin sulit, dan perwujudan transisi yang adil menghadapi tantangan yang lebih besar. Namun, terkait kebijakan iklim, pemerintah harus melibatkan sektor informal dan Dewan Adat yang akan terkena dampak langsung. Survei di kalangan pekerja sektor informal menunjukkan adanya minat yang kuat untuk berbagi perspektif mereka dengan pemerintah. Salah satu cara untuk melibatkan pekerja informal adalah dengan mengundang mereka ke pertemuan dua-tahunan di balai kota kabupaten, yang diselenggarakan misalnya oleh Badan Perlindungan Lingkungan. Untuk menangani kesenjangan pengetahuan yang ada, pemerintah dapat meningkatkan peranannya dalam mendidik pekerja sektor informal dan Dewan Adat tentang kebijakan iklim dan strategi transisi yang adil. Demikian pula, pemerintah perlu memikirkan kesulitan yang dialami oleh pekerja informal dan masyarakat tradisional selama ketentuan lockdown yang diberlakukan. Meskipun secara teori mereka memenuhi syarat untuk program bantuan krisis, hanya sebagian kecil dari mereka yang dapat menerima bantuan tersebut.

Kotak 7. Negara Tradisional dan Dewan Tradisional

Sejumlah 190 Dewan Tradisional di Ghana mewakili Negara Traditional, yang telah ada selama ratusan tahun dan mendahului pemerintahan kolonial Inggris mulai tahun 1844.[24] Negara Tradisional secara luas diakui sebagai pemelihara tanah, sumber daya alam, dan badan air. Namun, mereka sebagian besar terpinggirkan dalam pengembangan kebijakan dan strategi perubahan iklim di Ghana. Untuk penelitian ini, tim peneliti dalam negeri berbicara dengan empat pemimpin tradisional, dua Kepala Tertinggi dan dua Ibu Ratu Tertinggi. Para pemimpin tradisional tersebut menyatakan bahwa perubahan iklim telah membawa dampak langsung pada pertanian dan badan air dan mempengaruhi industri berbasis ekspor dan manufaktur di Ghana. Pemimpin tradisional ini tidak mengetahui tentang strategi transisi yang adil menuju perubahan iklim seperti yang diumumkan atau dipublikasikan secara resmi oleh pemerintah. Namun, mereka semua menyarankan agar strategi perubahan iklim diperkenalkan dan diterapkan secara adil dan berkelanjutan sehingga tidak terlalu mengganggu kehidupan warganya dan mereka secara umum menghargai semangat yang mendasari strategi transisi yang adil untuk perubahan iklim. Demi mencapai transisi yang adil di Ghana, para pemangku kepentingan ini harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan pemerintah serta otoritas daerah harus membuat sejumlah ketentuan untuk mewujudkan hal ini.

Kotak 8. Ekonomi Informal

Pekerja sektor informal menyumbang sekitar 86% hingga 88% dari serikat pekerja di Ghana. Mereka sebagian besar adalah wiraswasta seperti petani, pedagang, pengolah makanan, seniman, dan pembuat kerajinan. Sektor ini terdiri dari berbagai kegiatan. Di pedesaan Ghana, pekerjaan sektor informal terutama melibatkan pertanian (75%), penangkapan dan pengolahan ikan serta pengolahan berbasis pertanian. Sebaliknya, lebih banyak pekerja perkotaan (43%) yang terlibat dalam kegiatan non-pertanian. Lebih dari separuh pekerja (55,9%) adalah pekerja mandiri (wiraswasta); 20,4% bekerja di perusahaan keluarga dan 17,6% adalah karyawan upahan.

Lebih banyak pekerja di perkotaan terlibat dalam kegiatan non-pertanian sedangkan pekerja di pedesaan terutama di bidang pertanian. Kebanyakan wiraswasta bekerja di bidang pertanian dan merupakan pemilik tunggal. Lalu berlanjut dengan kontribusi kerabat sebagai pekerja di bidang pertanian (tanpa karyawan). Ada juga karyawan, pekerja dari keluarga/kerabat dan pekerja magang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi non-pertanian.[25]

Hasil survei menunjukkan bahwa pekerja sektor informal memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tentang perubahan iklim dan dampaknya. Sebanyak 80% dari mereka menunjukkan bahwa mereka sudah mengetahui masalah ini. Sebagian besar (80%) mengatakan bahwa perubahan iklim mempengaruhi pekerjaan mereka, dengan 73% menyatakan bahwa perubahan iklim mengakibatkan penurunan produksi pertanian.

Hampir semua pekerja sektor informal yang disurvei (93%) mengatakan tidak ada kebijakan yang melindungi usaha mereka dari perubahan iklim. Hanya 4% yang menyatakan bahwa mereka terlibat dalam pengembangan kebijakan yang relevan. Para pekerja sektor informal tertarik untuk diajak berkonsultasi oleh pemerintah tentang pengembangan kebijakan, di mana sebanyak 80% mengatakan bahwa keterlibatan ini sangat penting.

Kolombia

Studi Kasus



Studi Kasus Kolombia

Studi kasus berikut ini merangkum dan menganalisis penelitian yang dilakukan oleh mitra-mitra dalam negeri.

$15.634
PDB per kapita PPP

51,3
Koefisien Gini

50 juta
populasi

4,2%
populasi di bawah garis kemiskinan

Republik presidensial
dengan pemilihan pada bulan Agustus 2022

Faktor ekonomi yang membedakan
Sangat bergantung pada ekspor energi dan pertambangan. Juga eksportir kopi terbesar ketiga, AFOLU (deforestasi)

Industri besar
tekstil, pengolahan makanan, minyak, pakaian dan alas kaki, minuman, bahan kimia, semen; emas, batu bara, zamrud

62,3%
Sektor Informal

Sumber: World Bank 2020; BBC Country Profiles 2020, CIA World Fact Book 2020

Ikhtisar

Dalam beberapa dekade terakhir, kondisi sosial ekonomi di Kolombia telah meningkat pesat. Antara tahun 1973 dan 2018 persentase masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya turun dari 70,5% menjadi 14,1% dan antara tahun 2005 sampai 2019, PDB per kapita naik dari sekitar $11,95 menjadi $4.645,05.[IV] Selain itu, akses ke pendidikan telah meningkat secara signifikan dan selama dekade terakhir kemiskinan sudah berkurang setengahnya.[26] Demikian juga, cakupan Sistem Kesehatan Nasional telah berkembang hingga ke titik di mana saat ini sebagian besar penduduknya sudah tercakup,[VI] dan juga sudah terjadi peningkatan drastis terkait ketahanan pangan.[VII]

Meskipun ekonomi telah bertumbuh sejak pergantian milenium, pertumbuhan produktivitas masih rendah dikarenakan beberapa faktor, antara lain rendahnya keterampilan kerja, rendahnya integrasi perdagangan, dan besarnya hambatan dalam persaingan domestik. Meskipun dianggap sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas, Kolombia masih termasuk di antara 20 negara di dunia yang paling mengalami kesenjangan dalam hal ketimpangan pendapatan. Komoditas tak terbarukan termasuk minyak dan batu bara merupakan sebagian besar ekspor Kolombia, yang membuatnya rentan terhadap penurunan tajam harga komoditas. Penurunan drastis harga batu bara termal global baru-baru ini telah menyebabkan PHK besar-besaran di sektor batu bara formal, yang tidak mendapat tanggapan dari pemerintah.

IV 45.000 hingga 17,5 juta peso Kolombia. Kurs pada 25 Juni 2021: 1 Peso Kolombia setara dengan 0,00027 Dollar Amerika
V Antara 2002 dan 2017 cakupan bruto naik dari 23,7% menjadi 52,8%
VI Cakupan Sistem Jaminan Sosial Kesehatan meningkat dari 29,2% pada tahun 1995 menjadi 94,6% pada tahun 2018.
VII Antara tahun 2010 dan 2015 persentase keluarga dengan kerawanan pangan meningkat dari 57,7 % menjadi 54,2%.

Studi Kasus Kolombia

Konsep transisi yang adil sudah dikenal oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan dan pemerintah, dan transisi yang adil juga secara eksplisit disebutkan di dalam revisi NDC Kolombia:

"Transisi yang adil akan berusaha berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan inklusi sosial dan ekonomi dari seluruh populasi, yang menjamin agar tidak ada yang terabaikan dan mengandalkan dialog sosial yang menghubungkan partisipasi para pengusaha, pekerja dan pemerintah, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam desain dan implementasinya."

Bersamaan dengan kontribusi ini, pemerintah Kolombia telah mengadopsi kebijakan untuk mendiversifikasi ekonomi dan mendukung penciptaan lapangan kerja di sektor non-ekstraktif. Pemerintah juga telah membuat komitmen untuk mengembangkan strategi transisi yang adil pada akhir tahun 2023 dan telah menunjukkan kesediaan untuk melibatkan para pemangku kepentingan dalam prosesnya.

Keterlibatan dengan para pemangku kepentingan tengah dijalankan, namun sejumlah upaya terkait Covid-19 menjadi penghalang utama dalam proses tersebut. Telah diperkirakan dari awal bahwa kombinasi dari pembatasan perjalanan akibat Covid-19, dan kekhawatiran akan antipati dan ketidakseimbangan kekuatan di antara pemangku kepentingan tertentu akan membawa dampak dan mendistorsi hasil. Saat itu diyakini bahwa faktor-faktor tersebut paling tepat diatasi dengan menggunakan kuesioner yang dikirim melalui email, namun metode keterlibatan ini juga terbukti tidak berhasil. Setelah melakukan konsolidasi lebih lanjut, bentuk keterlibatan yang paling efektif dan sukses terbukti adalah wawancara personal yang dilakukan antara peneliti dan kelompok pemangku kepentingan. Dengan cara ini proyek dapat dirinci dan dijelaskan, dan bila ada pertanyaan ataupun reaksi dapat langsung ditangani. Wawancara tersebut mengungkapkan bahwa asosiasi minyak dan batubara merasa transisi bukan merupakan prioritas mendesak bagi mereka, namun serikat pekerja di industri minyak (USO) mengakui bahwa industri harus secara bertahap bermigrasi ke bisnis energi terbarukan. Wawancara dengan perwakilan dari kelompok adat membahas kekhawatiran bahwa kebijakan konservasi akan berdampak negatif pada kedaulatan atas wilayah leluhur mereka.

Kotak 9. NDC dan Komitmen Transisi yang Adil

Sumber utama emisi GRK di negara ini terkait dengan praktik penggunaan lahan, terutama karena deforestasi dan degradasi hutan, dan dengan konsumsi bahan bakar fosil oleh sektor energi dan transportasi. Kategori pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya mewakili 50% dari emisi nasional. Penggunaan energi setara dengan 36% emisi nasional.[27] Dengan demikian, sebagian besar kegiatan pengurangan emisi perlu dilakukan di sektor-sektor tersebut.

Pada bulan Oktober 2020, Pemerintah Kolombia mengajukan proposal konsultasi publik untuk mewujudkan NDC Nasional. Proses konsultasi yang dipimpin oleh pemerintah ini dikoordinasikan oleh Komisi Antar Sektor untuk Perubahan Iklim dengan partisipasi agen publik dan swasta, akademisi dan perwakilan masyarakat sipil, termasuk perwakilan dari berbagai kelompok etnis, organisasi pemuda dan perempuan.

Sebagai bagian dari proses ini, pada bulan Desember 2020 pemerintah menerbitkan versi konsolidasi dari NDC. Versi NDC yang diperbarui ini mencakup referensi untuk transisi yang adil dan mencakup target 2023 bagi Kementerian Ketenagakerjaan untuk merumuskan strategi nasional tentang transisi yang adil bagi tenaga kerja.

Studi Kasus Kolombia

Kotak 10. Covid-19

Pemerintah mengambil tindakan yang bertujuan untuk melindungi kehidupan dan mata pencaharian dan mendukung ekonomi serta mengumumkan paket fiskal yang cukup besar untuk tahun 2020 dan 2021, dengan total lebih dari $8.228.959.300 ,[VIII] (atau hampir 3% dari PDB 2019). Tindakan tersebut termasuk meningkatkan transfer finansial bagi kelompok rentan melalui perluasan program yang ada dan pembentukan program baru (*Ingreso Solidario*, yaitu program bantuan tunai tanpa syarat, dan penggantian PPN untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah), penundaan pemungutan pajak di sektor-sektor tertentu, tarif yang lebih rendah untuk impor barang kesehatan strategis, dan bantuan bagi perusahaan yang terpukul keras untuk membayar karyawan.[28] Pemerintah juga menyiapkan jalur khusus penjaminan kredit dan pinjaman untuk perusahaan di sektor yang sangat terkena dampak krisis, misalnya kopi dan pariwisata. Selain itu, pada tahun 2020 pemerintah berjanji untuk menyisihkan $120 juta untuk membantu sekitar tiga juta pekerja ekonomi informal yang tidak memiliki jaring pengaman keuangan.[29]

Meski dengan program-program bantuan yang ada, wabah Covid-19 di Kolombia telah berdampak buruk pada negara ini, dengan ribuan nyawa hilang. Selain itu, negara ini telah mengalami resesi terburuk selama hampir 50 tahun, dengan ekspor di sektor batu bara dan minyak menurun karena kurangnya permintaan global. Komposisi dan keunggulan di sektor ekspor merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi Kolombia ketika mempertimbangkan transisi yang adil.

Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya

Banyak intervensi oleh badan-badan internasional terkait transisi yang adil di Kolombia difokuskan pada sektor batu bara dan minyak, sedangkan kontributor terbesar perubahan iklim adalah sektor AFOLU.[IX] Para pekerja di sektor AFOLU seringkali bersifat informal, dengan banyak pekerjaan yang ilegal sehingga mereka tidak memiliki dokumen. Oleh karena itu, penting agar tahap proyek selanjutnya fokus pada pengembangan strategi keterlibatan sektor ini. Selain itu, Kolombia juga dihadapkan pada masalah di mana banyak pekerja di bidang AFOLU ini bekerja secara ilegal, dengan kegiatan-kegiatan yang dipromotori, dikendalikan, dan dilindungi oleh organisasi kriminal dan tidak ada perlindungan dari pemerintah.

Melibatkan sektor informal sangat penting untuk mengembangkan kebijakan dan proses di balik strategi transisi yang adil di Kolombia, sesuai dengan revisi NDC mereka. Kegiatan berbagi pengetahuan dan peningkatan kapasitas sangat penting, oleh karena itu para pemangku kepentingan harus mendapat informasi dan sumber daya yang cukup untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses ini. Pemerintah Kolombia telah bertemu dengan sektor informal dan memiliki beberapa strategi. Melalui diskusi dengan perwakilan dari kelompok adat mereka menjelaskan bahaya dan efek negatif dari aksi iklim, khususnya strategi konservasi terkait hak atas wilayah leluhur mereka. Sangatlah penting bahwa para konservasionis dilibatkan untuk mencapai transisi yang adil – untuk mengakui dan memahami hak-hak kelompok adat.

Bila ada perubahan dalam pemerintahan setelah pemilu 2022 mendatang, mungkin di negara ini akan terjadi penyelarasan ulang komitmen untuk mewujudkan transisi yang adil. Masyarakat sipil harus siap menjadi advokat yang efektif dalam proses ini.

VIII 31 triliun peso Kolombia. Nilai tukar pada 25 Juni 2021: 1 Peso Kolombia sama dengan 0,00027 Dollar Amerika

IX Emisi GRK gabungan dari sektor pertanian dan penggunaan lahan Kolombia adalah 146,57 $MtCO_2e$ pada tahun 2018, lebih tinggi dari pangsa sektor energi yaitu 91,75 $MtCO_2e$.

Kotak 11. Ekonomi Informal

Kolombia memiliki salah satu pasar tenaga kerja informal terbesar di Amerika Latin dengan 62,3% tenaga kerja pada tahun 2017 bekerja secara informal. Para pekerja ini tidak memiliki kontrak kerja formal dan tidak mendapatkan perlindungan dan tunjangan sosial yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Sebagian besar pekerja langsung di sektor minyak dan gas adalah pekerja formal. Namun, dalam industri batu bara, meskipun pekerja yang dipekerjakan oleh operasi pertambangan besar bersifat formal, informalitas seringkali terjadi dalam operasi pertambangan kecil dan operasi rakyat; khususnya di tambang-tambang yang tidak memiliki hak penambangan formal. Menurut Kementerian Pertambangan, sebesar 17% tambang batubara skala menengah dan 50% tambang kecil tidak memiliki hak tambang yang sah dan tidak ada data jumlah pekerja informal di tambang batubara kecil dan menengah. Sebagian besar pekerja di sektor AFOLU, khususnya yang bekerja di industri perkayuan, adalah pekerja informal. Mereka termasuk pekerja independen yang terlibat dalam aktivitas legal dan ilegal, dengan aktivitas yang dipromotori, dikendalikan dan dilindungi oleh organisasi kriminal dan tidak mendapat perlindungan dari pemerintah. Pembukaan hutan untuk membangun sistem pertanian berbahaya atau tanaman ilegal, eksploitasi serta eksploitasi berlebihan untuk kayu dan penambangan ilegal dan informal, seringkali merupakan pilihan ekonomi bagi pekerja pedesaan informal yang tidak memiliki alternatif mata pencaharian formal dan berkelanjutan.

Investor, Donor dan MDBS

Salah satu pendekatan yang diambil oleh Multilateral Development Banks (MDBs) (lihat Gambar 3 di bawah) adalah bekerja secara kolektif melalui Climate Investments Funds (CIFs) untuk mengembangkan alat dan kerangka kerja baru yang dapat membantu pemangku kepentingan utama dalam penerapan strategi transisi yang adil. Kotak 12 dan 13 menunjukkan dua inisiatif signifikan yang mencerminkan pentingnya inisiatif tersebut diasosiasikan dengan transisi yang adil, dan tindakan relatif yang sedang berlangsung.



Gambar 3: Multilateral Development Banks

Untuk mendapatkan pemahaman tentang transisi yang adil di bidang ini, enam wawancara semi-terstruktur telah dilakukan dengan donor dan investor. Enam organisasi yang diwawancarai adalah: Asian Development Bank (ADB), African Development Bank (AfDB), Climate Investment Funds (CIF), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Inter-American Development Bank (IADB) dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Dari wawancara tersebut didapati bahwa seluruh aktor telah menyadari pengaruh perubahan iklim dalam investasi dan pelaksanaan proyek mereka, dan seringkali perlu menyesuaikan persyaratan mereka dengan keadaan ekonomi, lingkungan dan sosial tertentu di negara tersebut. Pada saat ini transisi yang adil bukanlah persyaratan khusus dalam pemberian pinjaman dan investasi bagi para aktor ini, namun mereka semua terlibat secara aktif dalam pengembangan strategi. Di Amerika Latin, IADB telah mengadopsi Perlindungan Lingkungan dan Sosial dari World Bank (WB) dan International Monetary Fund (IMF) tetapi belum mulai menggunakan terminologi transisi yang adil.

Pengantar CIF tentang inisiatif transisi yang adil cukup menggambarkan sikap yang mereka sampaikan selama wawancara:

"Untuk mengatasi tantangan perubahan iklim, negara-negara akan terus beralih dari sumber energi intensif emisi dan mengambil langkah-langkah untuk membangun masyarakat dan ekonomi yang lebih tangguh. Pentingnya mencapai transisi yang adil dalam menghadapi perubahan transformasional ini telah berkembang selama beberapa tahun terakhir karena dampak menganggu dari perubahan iklim serta ruang lingkup dan skala transformasi yang harus dilaksanakan sudah menjadi lebih jelas fokusnya. Meskipun kesadaran akan pentingnya hal ini sudah semakin bertambah, namun sangat sedikit sumber daya yang tersedia bagi negara, investor, masyarakat sipil, dan lembaga pembangunan internasional yang berusaha mencapai transisi yang adil."[30]

Yang terpenting, studi ini menunjukkan bahwa para donor, investor, dan MDB menjadi semakin sadar akan pentingnya investasi dan proyek yang berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik suatu negara. Mereka memiliki kapasitas untuk memberikan dukungan penting dalam hal keuangan dan teknis bagi pemerintah yang mempertimbangkan untuk mengimplementasi dan mengeksplorasi strategi transisi yang adil, karenanya mereka memiliki pengaruh terhadap pemerintah seputar inisiatif kebijakannya. .

Investor, Donor dan MDBS

Kotak 12. Aliran kerja CIF dalam Transisi yang Adil

Climate Investment Funds (CIF) menerapkan beberapa alur kerja terkait transisi yang adil yang mencakup Inisiatif transisi yang adil [yang sudah berkembang dengan baik] – yaitu sebuah proyek kemitraan baru oleh CIF dan *Center for Strategic and International Studies' Energy Security & Climate Change Program* untuk menginvestigasi bagaimana cara mencapai transisi yang adil melalui perubahan tranformasional yang diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim. Upaya kolaboratif ini akan melakukan analisis sistematis terhadap berbagai pemahaman dan komponen transisi yang adil dan menumbuhkan komunitas pemangku kepentingan dan cendekiawan yang terlibat dalam ruang ini. Inisiatif ini menciptakan platform publik berisi sumber daya dan panduan untuk transisi yang adil dalam konteks upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selain itu, CIF sedang mengembangkan studi kasus negara untuk mengeksplorasi elemen kunci dari transisi yang adil dan mempelajari tentang bagaimana investasi CIF berinteraksi dengan upaya transisi yang adil di berbagai negara.

Inisiatif-inisiatif yang berlangsung selama beberapa tahun ini akan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan strategi melalui analisis studi kasus, konsultasi, dan tinjauan literatur. Inisiatif tersebut juga akan mengidentifikasi perbedaan dan kesenjangan—baik dalam pemahaman konseptual maupun praktis—dari transisi yang adil dan memfasilitasi berbagi pengetahuan dan kemitraan di antara pemangku kepentingan dan cendekiawan.

Kotak 13. Laporan Inisiatif Transisi yang Adil EBRD (Juni 2020)[31]

Meski masih dalam tahap awal, laporan tersebut merupakan puncak dari pekerjaan yang dilakukan selama dua tahun terakhir. EBRD mengusulkan untuk melakukan pilot sebelum inisiatif lebih lanjut ditingkatkan. Tujuan dari pilot ini adalah untuk mendukung negara-negara di UE, terutama untuk fokus pada tingkat proyek, dan di luar UE yang relevan. Dari pekerjaan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar negara di luar UE juga dalam tahap awal memikirkan masalah yang ada di dalam laporan transisi yang adil mereka. Masalah ini akan tetap menjadi fokus mereka selama 12-18 bulan ke depan.

Melalui keterlibatan dengan donor, investor, dan MDB pada tahap awal proyek ini, ditemukan bahwa meskipun transisi yang adil belum menjadi pertimbangan dalam kriteria keputusan investasi mereka, semua secara aktif terlibat dalam mengembangkan strategi transisi yang adil, untuk diterapkan baik dalam persyaratan pinjaman mereka, dan sebagai proyek untuk investasi.

Kesimpulan

Tiga studi kasus ini membuktikan pentingnya mengeksplorasi transisi yang adil di tingkat nasional, dan metode untuk mengembangkan strategi transisi yang adil. Setiap negara mitra mengadopsi definisi mereka sendiri tentang transisi yang adil untuk mengkomunikasikan dan menjelaskan konsep tersebut kepada para pemangku kepentingan. Meskipun sebagian besar pemangku kepentingan belum terbiasa dengan istilah 'transisi yang adil', mereka semua melihat manfaat keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan untuk bergerak menuju ekonomi rendah karbon.

Masing-masing dari mereka mengembangkan metodologi sendiri untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan mencapai keberhasilan yang beragam. Di banyak kasus, bekerja dengan sektor-sektor seperti ekonomi informal cukup menantang, karena mereka seringkali tidak diatur atau diperlakukan sebagai 'kelompok' atau 'badan' oleh pemerintah, dan berbagai metode terus dikembangkan terkait masalah ini. Pandemi Covid-19 dan langkah-langkah responsnya juga menghadirkan tantangan bagi penelitian ini. Keadaan yang sering terjadi adalah pertemuan tatap muka tidak dapat dilakukan, demikian juga halnya sebagian besar perhatian dan sumber daya pemerintah jadi teralihkan untuk mengatasi masalah ini. Dari penelitian ini ditemukan bahwa strategi transisi yang adil belum pernah dipertimbangkan untuk digabungkan dengan respons Covid-19 oleh negara-negara di mana studi kasus ini dilakukan, karena mereka harus menghadapi krisis kesehatan dan lingkungan perdagangan dan keuangan yang memburuk.

NDC merupakan instrumen formal dan mengikat secara hukum, dan penggabungan strategi transisi yang adil dan mencerminkan konteks nasional ke dalam NDC suatu negara memiliki implikasi penting bagi dukungan kelembagaan untuk mengimplementasi transisi ini. Namun dimasukkannya strategi transisi yang adil ke dalam NDC tidak menjadi jaminan terwujudnya pendekatan yang inklusif dan adil untuk transisi rendah karbon. Meski kerangka politik merupakan elemen fundamental dari transisi yang adil, pelibatan pemangku kepentingan bersangkutan untuk membentuk transisi masih menjadi tantangan yang signifikan. Misalnya, studi ini menunjukkan bahwa transisi yang adil sudah disebut di dalam revisi NDC di Kolombia, namun belum mendorong transisi rendah karbon yang inklusif meskipun sudah diatur oleh hukum.

NDC juga merupakan dokumen yang kuat untuk menunjukkan niat untuk implementasi transisi yang adil kepada pemangku kepentingan dan MDB, misalnya untuk mendapat akses keuangan. NDC memberikan titik awal yang substansial untuk mendorong diskusi seputar insentif dan dasar yang tepat untuk keputusan keuangan, sosial, politik, dan lingkungan di masa depan. Selain itu, memasukkan strategi transisi yang adil ke dalam NDC juga berguna untuk berbagi pengetahuan dan mempopulerkan konsep tersebut di dalam dan antar negara.

Ada tiga gagasan/temuan yang menonjol dari laporan ini yang disajikan dalam diagram Venn di bawah ini (Gambar 4).



Gambar 4: Temuan kunci studi ini

Kesimpulan

Kepemilikan dan Kepemimpinan dalam Transisi yang Adil
Untuk memiliki kepemilikan terhadap transisi yang adil dalam konteks nasional tertentu, penting untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pemangku kepentingan terkait. Laporan ini telah merinci bagian awal proses tersebut di tiga negara; Ghana, Kolombia dan Indonesia, di mana keterlibatan sudah berlangsung pada tingkat yang berbeda-beda. Masyarakat harus menjadi pusat transisi yang adil, dan oleh karena itu, tanpa inklusivitas dan keragaman, suatu transisi tidak akan adil karena kelompok-kelompok marginal mungkin tidak diajak berkonsultasi dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga mengabaikan kesenjangan yang ada. Bahkan, pemerintah dapat menggunakan rencana kebijakan iklim, yang tentunya mempengaruhi semua bagian masyarakat, sebagai kesempatan untuk memperkuat partisipasi yang berarti dari kelompok-kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam pembuatan kebijakan. Survei dan wawancara yang dilakukan di antara pekerja informal dan pemimpin tradisional di Ghana menunjukkan keinginan yang kuat dari kelompok-kelompok tersebut untuk ambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan; terutama karena mereka termasuk yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim.

Penting bagi pemerintah, atau lembaga daerah untuk mengembangkan dan mengadopsi makna atau definisi mereka sendiri tentang transisi yang adil, yang menempatkan keadilan dan masyarakat sebagai pusatnya. Dengan cara ini, mereka dapat menangani sektor-sektor yang relevan dan menetapkan batas-batas yang tepat sesuai dengan konteks negara mereka. Tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua terkait transisi yang adil, dan dalam konteks nasional, lembaga pemerintah dapat memainkan peran penting dalam membentuk pendekatan tersebut.

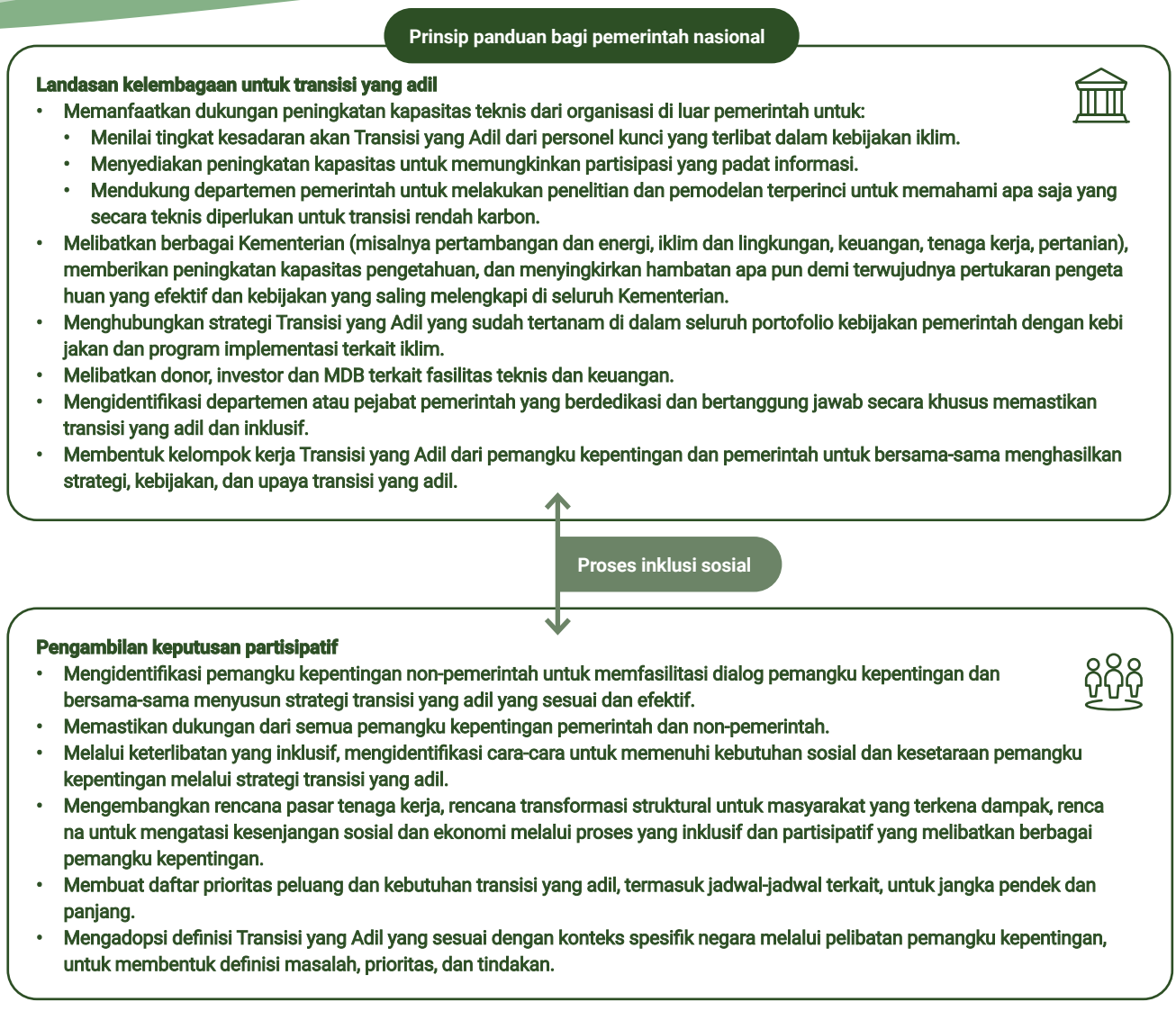
Pentingnya penyusunan bersama dan kolaborasi
Proyek ini telah menunjukkan pentingnya pengetahuan, keahlian dan kontak lokal melalui mitra-mitra dalam negeri. Wawasan tersebut diperoleh dari kelompok-kelompok yang selama ini belum pernah didengarkan dalam pembuatan kebijakan iklim, apalagi strategi transisi yang adil, seperti tentang pekerja informal di Ghana. Karena setiap negara mengembangkan metodologi mereka sendiri, tahap selanjutnya dari proyek ini akan fokus pada berbagi pengetahuan antar negara untuk semakin mengembangkan strategi mereka.

Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan merupakan hal yang kompleks dan harus disesuaikan dalam konteks setiap negara. Ini adalah proses yang masih dijajaki di berbagai tingkatan, dengan langkah pertama adalah peningkatan kapasitas di seluruh masyarakat.

Mewujudkan cakupan global untuk transisi yang adil
Studi ini memperkenalkan dialog penting seputar transisi yang adil yang melampaui cakupan negara maju. Meskipun wacana transisi yang adil di negara berkembang masih berada dalam tahap awal, proyek ini menunjukkan wawasan penting, termasuk keterlibatan pemangku kepentingan yang berbeda, pemahaman tentang partisipasi yang adil dan keterlibatan dalam perdebatan transisi dan dinamika kekuasaan dalam konteks nasional yang berbeda. Studi ini memberikan beberapa indikasi mengenai aktor mana yang tertarik untuk terlibat dalam diskusi seputar arti transisi yang adil dalam konteks lokal dan bagaimana langkah-langkah transisi yang adil dapat dilaksanakan. Studi lebih lanjut mengungkap hambatan pada konteks spesifik dan peluang untuk mengatasi hambatan tersebut, namun pemahaman yang lebih mendalam tentang transisi, pengarahan dan pengembangan kapasitas dalam konteks lokal masih perlu dikembangkan. Meskipun transisi yang adil di negara berkembang masih merupakan konsep baru yang memerlukan pengembangan lebih lanjut, proyek ini menghasilkan wawasan yang kuat tentang berbagai tantangan dan menyoroti kesenjangan yang penting dalam penelitian.

Rekomendasi pedoman

Bagian ini memberikan gambaran umum tentang prinsip-prinsip transisi yang adil, serta pedoman yang direkomendasikan untuk pemerintah nasional. Pedoman ini dikembangkan berdasarkan temuan penelitian. Seperti yang telah diketahui, tidak ada satu model yang mungkin cocok untuk semua, bahwa keadaan setiap negara bersifat unik, dan makna transisi yang adil harus disesuaikan sedemikian rupa. Prinsip transisi yang adil tingkat tinggi adalah strategi penting yang mendasari wacana transisi yang adil. Namun, pemerintah juga dapat mengambil manfaat dari alat dan pendekatan yang lebih spesifik untuk strategi transisi yang adil. Misalnya, penelitian menemukan bahwa peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan lain yang terkena dampak harus ditingkatkan. Selain fondasi kelembagaan untuk transisi yang adil, pendekatan inklusif dan partisipatif dalam konteks spesifik negara perlu dijunjung tinggi. Demikian pula, donor dan MDB memiliki peran penting dalam memastikan pekerjaan mereka selaras dengan prinsip dan visi transisi yang adil. Pedoman perintis ini dapat memberikan pengarahan dalam pengembangan kapasitas dan mendorong transisi energi yang adil.



Gambar 5: Prinsip panduan bagi pemerintah nasional

Pandangan / Langkah selanjutnya

Seiring dengan terus berlangsungnya krisis iklim, semakin banyak pemerintah dan lembaga yang ingin menerapkan kebijakan iklim yang cepat dan adil. Kerangka transisi yang adil memberikan manfaat tambahan yang membahas aksi iklim dan keadilan sosial. Saat ini, strategi transisi yang adil untuk negara berkembang kurang dieksplorasi dan dikembangkan secara praktis.

Pada tahap proyek selanjutnya, kami akan terus bekerja dengan para peneliti di Indonesia, Ghana, dan Kolombia untuk memperkuat implementasi transisi yang adil dalam NDC dan respons Covid-19 mereka. Tahap ini juga akan memperkenalkan enam negara studi kasus baru yang dipilih berdasarkan keadaan lingkungan, sosial dan ekonomi mereka yang beragam. Keragaman keadaan ini akan memberikan rentang pengalaman yang lebih komprehensif yang dapat diambil oleh pemerintah dan masyarakat sipil di negara lain sebagai pedoman.

Daftar pustaka

1. COP24 (2018): Archive site. https://cop24.gov.pl/ (last accessed: June 28th 2021).
2. https://cdn.sei.org/wp-content/uploads/2020/06/seven-principles-for-a-just-transition.pdf
3. ILO (2018): More than 60 per cent of the world's employed population are in the informal economy. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_627189/lang--en/index.htm (last accessed: June 28th 2021).
4. Climate Action Tracker (2015). https://climateactiontracker.org/publications/climate-pledges-will-bring-27c-of-warming-potential-for-more-action/ (last accessed: June 28th 2021).
5. Cugat, G. & Narita, F. (2020): How COVID-19 Will Increase Inequality in Emerging Markets and Developing Economies. IMF. How COVID-19 Will Increase Inequality in Emerging Markets and Developing Economies – IMF Blog (last accessed: May 29th 2021).
6. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
7. Wehnert, T. et al. (2021): Green Recovery Tracker. Wuppertal Institut and E3G. https://www.greenrecoverytracker.org/ (last accessed: 31st May 2021).
8. 109th International Labour Conference: Global agreement reached at ILO Conference on action for COVID-19 recovery
9. Cugat, G. & Narita, F. (2020): How COVID-19 Will Increase Inequality in Emerging Markets and Developing Economies. IMF. How COVID-19 Will Increase Inequality in Emerging Markets and Developing Economies – IMF Blog (last accessed: May 29th 2021).
10. Glynn, P.J., Błachowicz, A. & Nicholls, M. (2020): Incorporating just transition strategies in developing country Nationally Determined Contributions, Climate Strategies. https://climatestrategies.org/publication/justtransitionndc/
11. The World Bank (2021): Overview. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview#1 (last accessed: June 28th 2021).
12. Oxfam (2017): Towards a More Equal Indonesia: How the government can take action to close the gap between the richest and the rest. https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/bp-towards-more-equal-indonesia-230217-en_0.pdf (last accessed: June 28th 2021).
13. Yusuf, A. A. & Sumner, A. (2015): Growth, Poverty, and Inequality under Jokowi, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 51:3, 323-348. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00074918.2015.1110685?needAccess=true

Daftar pustaka

14. Salbiah, N. A. (2021): Indonesia Netral Karbon Pada 2060, Semua Pihak Harus Turun Tangan. https://www.jawapos.com/ekonomi/14/06/2021/indonesia-netral-karbon-pada-2060-semua-pihak-harus-turun-tangan/?page=all (last accessed: May 29th 2021).
15. COP24 (2018): Solidarity and Just Transition Silesia Declaration. https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/Solidarity_and_Just_Transition_Silesia_Declaration_2_.pdf (last accessed: May 31st 2021).
16. International Trade Union Confederation (2021): Indonesia. A trade union focus on the SDGs. https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/sdg_country_report_2021_indonesia_en.pdf (last accessed: May 31st 2021).
17. Indonesia Overview (worldbank.org) (last accessed June 2nd 2021).
18. IMF (2021): Policy Responses to Covid-19. https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#I (last accessed: June 28th 2021).
19. OECD (2020): Indonesia | OECD Tourism Trends and Policies 2020. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/6c4fc1cd-en/index.html?itemId=/content/component/6c4fc1cd-en (last accessed: June 28th 2021).
20. Oxfam (n.d.): Ghana: extreme inequality in numbers. https://www.oxfam.org/en/ghana-extreme-inequality-numbers#:~:text=2%25%20The%20wealthiest%2010%25%20of,and%20to%20have%20fewer%20assets (last accessed: June 28th 2021).
21. The World Bank (2021): Overview. https://www.worldbank.org/en/country/ghana/overview (last accessed: June 28th 2021).
22. Oxfam (n.d.): Ghana: extreme inequality in numbers. https://www.oxfam.org/en/ghana-extreme-inequality-numbers#:~:text=2%25%20The%20wealthiest%2010%25%20of,and%20to%20have%20fewer%20assets (last accessed: June 28th 2021).
23. Republic of Ghana (2015): Ghana's intended nationally determined contribution (INDC) and accompanying explanatory note. https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Ghana%20First/GH_INDC_2392015.pdf
24. Tieleman, J. & Uitermark, J. (2018): Chiefs in the City: Traditional Authority in the Modern State. Sociology. 2019;53(4):707-723. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0038038518809325
25. Osei-Boateng, C. & Ampratwum, E. (2011): The Informal Sector in Ghana. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ghana/10496.pdf
26. The World Bank (2021): Colombia Overview. https://www.worldbank.org/en/country/colombia/overview (last accessed: June 28th 2021).
27. Climate Watch (n.d.) Data Explorer. https://www.climatewatchdata.org/data-explorer/historical-emissions?historical-emissions-data-sources=cait&historical-emissions-gases=all-ghg&historical-emissions-regions=All%20Selected%2CCOL&historical-emissions-sectors=All%20Selected&page=1 (last accessed: June 28th 2021).
28. The World Bank (2021): Colombia Overview. https://www.worldbank.org/en/country/colombia/overview (last accessed: June 28th 2021).
29. Moloney, A. (2020). Left jobless by pandemic, Colombia's informal workers to get government aid. Reuters. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-colombia-trfn/left-jobless-by-pandemic-colombias-informal-workers-to-get-government-aid-idUSKBN21E3JN?edition-redirect=uk (last accessed: June 28th 2021).
30. CIF (n.d.): Just Transition. https://www.climateinvestmentfunds.org/topics/just-transition (last accessed: June 28th 2021).
31. EBRD (n.d.): The EBRD's just transition initiative. https://www.ebrd.com/what-we-do/just-transition-initiative (last accessed: June 28th 2021).

Tentang Mitra Penelitian

Dala Institute, Indonesia
Dala Institute adalah organisasi penelitian dan konsultasi yang didedikasikan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi solusi yang tahan lama untuk isu-isu kontemporer pada neksus antara alam dan masyarakat. Tim ini terdiri dari peneliti dan konsultan yang memahami bahwa tantangan terkait lingkungan dan masyarakat tidak terpisahkan.
www.dala.institute

University of Ghana, Departemen Ekonomi Pertanian dan Agribisnis
Departemen Ekonomi Pertanian dan Agribisnis di University of Ghana fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan humaniora di sektor pertanian, termasuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan global dan wacana nasional untuk pembangunan pertanian. Professor Kwabena A. Anaman, yang minatnya termasuk ekonomi politik, ekonomi sumber daya dan lingkungan dan perdagangan internasional, memimpin pekerjaan dalam proyek ini.
https://www.ug.edu.gh/aea/

Fedesarrollo, Kolombia
Yayasan Pendidikan Tinggi dan Pengembangan atau Fedesarrollo adalah organisasi non-profit swasta yang didedikasikan untuk penelitian tentang masalah kebijakan ekonomi dan sosial. Tujuannya adalah untuk berkontribusi pada desain, pemantauan, dan peningkatan kebijakan publik. Fedesarrollo mempromosikan, secara langsung atau tidak langsung, pembangunan ekonomi dan sosial negara melalui studi, publikasi dan debat di berbagai bidang kebijakan publik. Eduardo Uribe-Botero yang memimpin proyek ini sekarang bekerja sebagai Direktur Keberlanjutan di Energy Group di Bogota.
www.fedesarrollo.org.co

Climate Strategies
Climate Strategies bekerja di bidang science-policy interface, yang mengangkat kebijakan iklim melalui interaksi bermakna antara pembuat keputusan dan peneliti di seluruh Eropa dan internasional. Kami adalah jaringan peneliti nonprofit internasional yang beranggotakan jaringan luas peneliti terkemuka dunia.
www.climatestrategies.org

CLIMATE Strategies
dala institute
FEDESARROLLO Centro de Investigación Económica y Social
UNIVERSITY OF GHANA